PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Ika Saimima *)

Abstract

Perlindungan anak terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia Indonesia, karena anak adalah kelompok strategis keberlanjutan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*). Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana. Pada dasarnya anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, yaitu hak asasi manusia (HAM), namun yang terjadi adalah anak-anak pelaku tindak pidana tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya dalam suatu proses hukum. Hak-hak yang mereka miliki diabaikan begitu saja dengan perlakuan yang tidak manusiawi oleh pihak tertentu, dan kadang kala dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan diri sendiri, tanpa peduli bahwa perbuatannya telah melanggar hak-hak anak. Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 40 Konvensi Hak Anak yang berbunyi "Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak azasi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali/reintegrasi anak dan peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat". Oleh karena itu dalam proses penegakan hukum terhadap anak diharapkan sebagai bentuk **kontrol** dan **empathy** dalam arti kepekaan terhadap permasalahan yang dihadapi, terhadap perubahan sosial dan kebutuhan publik serta bentuk tanggungjawab masyarakat secara nyata di bidang hukum. Hukuman yang diberikan pada remaja ini dimaknai untuk melindungi ketertiban umum sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sifat dari penerapan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum kiranya hanya berupa *ultimum remedium* (pilihan terakhir). Oleh karena itu hukum yang dikenakan bukanlah satu pembalasan dendam, para perilaku delikuen tetaplah manusia, yang satu atau lain hal menyebabkannya terperosok pada lembah perilaku yang salah.

* Ika Saimima, SH., MM. Kepala Lembaga Penelitian Ubhara Jaya.

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah Tuhan yang pada dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Karena usianya anak merupakan manusia lemah sehingga untuk menjalani kehidupannya anak memerlukan orang lain. Anak merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap kekerasan baik ketika ia menjadi korban maupun pelaku kejahatan. Anak korban kekerasan seperti perkosaan, pencabulan, penganiayaan oleh orangtua dll, banyak yang tidak mendapatkan perlindungan. Hal ini karena ancaman dari pelaku, juga karena perlakuan oknum Polisi saat pemeriksaan. Demikian pula dengan anak yang melakukan kejahatan. Hak-haknya sering tidak dilindungi, baik saat proses penyidikan ataupun persidangan di pengadilan. Kenyataannya, anak melakukan tindak pidana karena dipengaruhi lingkungan sekitarnya. Dalam posisi ini hak anak untuk mendapatkan lingkungan yang baik untuk fisik dan mentalnya sebenarnya telah dilanggar. Karenanya tindak pidana yang dilakukan tidak hanya membuat ia menjadi pelaku tapi juga korban.

Pada kesempatan ini penulis lebih fokus pada perlindungan anak terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas Mutu Hidup Manusia Indonesia, karena anak adalah kelompok strategis keberlanjutan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU/23/2002).

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*). Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang

disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana.¹ Kemudian Majelis Umum PBB dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau yang dikenal dengan *Beijing Rules* mendefinisikannya sebagai berikut *a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence.*²

Dalam perspektif Konvensi Hak Anak (KHA)-(*Convention The Rights of The Child/CRC*), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/CNSP*).³

UNICEF menyebut dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances* (*CEDC*) karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri.⁴

Pada dasarnya anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, yaitu hak asasi manusia (HAM), namun yang terjadi adalah anak-anak pelaku tindak pidana tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya dalam suatu proses hukum. Hak-hak yang mereka miliki diabaikan begitu saja dengan perlakuan yang tidak manusiawi oleh pihak tertentu, dan kadang kala dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan diri sendiri, tanpa peduli bahwa perbuatannya telah melanggar hak-hak anak.

Hasil sementara studi menunjukan anak-anak konflik hukum memperoleh perlakuan yang buruk bahkan dalam beberapa hal telah

¹ Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hal. 1

² *Ibid.*

³ *Ibid*, hal. 5.

⁴ UNICEF, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 20.

diperlakukan lebih buruk bila dibandingkan dengan orang dewasa yang berada dalam situasi yang sama. Mayoritas dari anak konflik hukum mengaku telah mengalami tindak kekerasan ketika berada di kantor polisi. Bentuk kekerasan yang umum terjadi, yaitu kekerasan fisik berupa tamparan dan tendangan, namun ada juga kasus kekerasan yang sekaligus berupa pelecehan seksual seperti kekerasan yang ditujukan pada alat kelamin atau tersangka anak yang ditelanjangi. Dua hal seperti ini terjadi pada anak yang disangka melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan.

Selain kekerasan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dimana kekerasan merupakan bagian dari upaya memperoleh pengakuan, bentuk kekerasan lain yang terjadi, yaitu perampasan uang yang ada pada anak. Selain itu kekerasan juga terjadi dalam wujud penghukuman yaitu berupa tindakan memaksa anak untuk membersihkan kantor polisi (menyapu dan mengepel) dan membersihkan mobil.

Perlakuan buruk juga kadang masih terjadi ketika anak berada dalam Tahanan (RUTAN) maupun Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), perlakuan tersebut berupa pemalakan atau bentuk eksploitasi lainnya. Pada banyak kasus kekerasan semacam ini dilakukan oleh para tahanan /Napi anak dan dewasa ditempatkan dalam sel yang terpisah.

B. Pengertian Anak

Berbicara tentang anak maka batasan yang lazim cenderung dikaitkan dengan tingkat usia dan kondisi kejiwaan seseorang. Sementara itu, pengertian anak dalam konteks hukum pidana dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana dalam arti sampai seberapa jauh seseorang anak dalam batasan usia tertentu dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan (pidana) nya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara yuridis, batasan usia kapan seseorang dikategorikan anak terdapat berbagai

batasan sesuai dengan kepentingan masing-masing undang-undang dan berbagai aspek yang melatarbelakangi, satu pihak menetapkan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan di pihak lain menetapkan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, batasan dari aspek ketenagakerjaan batasan pekerja anak adalah 14 tahun. Berdasarkan aspek pidana dalam undang-undang pengadilan anak batasan kewenangan hakim untuk mengadili adalah 12 tahun. Sementara itu dalam UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang disebut dengan anak adalah berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.

C. Kenakalan Remaja

Juvenile Delinquency merupakan istilah yang padanannya dalam bahasa Indonesia memunculkan berbagai istilah dengan latar belakang pertimbangannya sendiri-sendiri. Di dalam studi ini istilah *Juvenile delinquency* diterjemahkan perilaku delinkuensi anak. Istilah ini tampaknya paling mendekati pengertian *Juvenile delinquency*, dan bersifat netral.⁵ Berdasarkan Teori Sub Budaya Delinkuen dalam bukunya Albert K.Cohen yang berjudul *Delinquent Boys, the Culture of the Gang*, mengarahkan perhatiannya pada satu pemahaman bahwa perilaku delinkuen di kalangan usia muda kelas bawah merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai *cultural* masyarakat.⁶

Istilah kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) ini mengacu kepada rentang suatu perilaku yang luas, mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial (seperti bertindak berlebihan di sekolah), pelanggaran (seperti

⁵ Soedarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990, hal. 10.

⁶ Albert.K.Cohen, *Delinquent Boys, the Culture of the Gang*, New York : The Press, 1955, page 25.

melarikan diri dari rumah), hingga tindakan-tindakan kriminal (seperti mencuri). Demi tujuan-tujuan hukum, dibuat suatu perbedaan antara pelanggaran-pelanggaran indeks (*index offenses*) dan pelanggaran-pelanggaran status (*status offenses*). Pelanggaran-pelanggaran indeks adalah tindakan kriminal, baik yang dilakukan oleh remaja maupun orang dewasa. Tindakan-tindakan itu meliputi perampokan, penyerangan dengan kekerasan, pemerkosaan, pelacuran, dan pembunuhan. Pelanggaran-pelanggaran status adalah tindakan-tindakan yang tidak terlalu serius seperti lari dari rumah, bolos dari sekolah, dan ketidakmampuan mengendalikan diri.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu :

1. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk : (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (ii) pemberantasan kejahatan; (iii) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Singgih D. Gumarso mengatakan dari segi hukum kenakalan remaja digolongkan dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma-norma hukum yaitu : (1) kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diantar dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum ; (2) kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa.⁷

⁷ Singgih D Gunarsa at al, 1988, *Psikologi Remaja*, Jakarta, BPK Gunung Mulya, hal, 19

Menurut bentuknya, kenakalan remaja kedalam tiga tingkatan ; (1) kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit (2) kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin (3) kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks diluar nikah, pemerkosaan dll.⁸

Sementara itu faktor eksternal yang menyebabkan kenakalan remaja yaitu :

a. Faktor keluarga

- 1) Baik buruknya rumah tangga atau berantakan dan tidaknya sebuah rumah tangga
- 2) Perlindungan lebih yang diberikan orang tua
- 3) Penolakan orang tua, ada pasangan suami istri yang tidak pernah bisa memikul tanggung jawab sebagi ayah dan ibu
- 4) Pengaruh buruk dari orang tua, tingkah laku kriminal, asusila

b. Faktor lingkungan sekolah

Lingkungan sekolah yang tidak menguntungkan bisa berupa bangunan sekolah yang tidak memenuhi persyaratan, di antaranya adalah :

- 1) Tanpa halaman bermain yang cukup luas
- 2) Tanpa ruangan olah raga
- 3) Minimnya fasilitas ruang belajar
- 4) Jumlah murid di dalam kelas yang terlalu banyak dan padat
- 5) Ventilasi dan sanitasi yang buruk dan lain sebagainya

c. Faktor lingkungan sekitar yang tidak selalu baik dan menguntungkan bagi pendidikan dan perkembangan remaja.

⁸ Suwarniyati Sartono, *Pengukuran Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta*, Jakarta, laporan penelitian, UI, 1985, hal. 25.

Dari semua hal di atas dapat dianalisa beberapa prediktor kenakalan meliputi identitas (identitas negatif), pengendalian diri (derajat rendah), usia (telah muncul pada usia dini), jenis kelamin (laki-laki), harapan-harapan bagi pendidikan (harapan-harapan yang rendah, komitmen yang rendah), nilai rapor sekolah (prestasi yang rendah pada kelas-kelas awal), pengaruh teman sebaya (pengaruh berat, tidak mampu menolak), status sosial ekonomi (rendah), peran orang tua (kurangnya pemantauan, dukungan yang rendah, dan disiplin yang tidak efektif), dan kualitas lingkungan (perkotaan, tingginya kejahatan, tingginya mobilitas).

Konformitas dengan tekanan teman-teman sebaya pada masa remaja dapat bersifat positif maupun negatif. Umumnya remaja terlibat dalam semua bentuk perilaku konformitas yang negatif seperti: menggunakan bahasa yang jorok, mencuri, merusak, dan sebagainya. Kenakalan remaja dan perkelahian massal itu merupakan refleksi dari perbuatan orang dewasa di segala sektor kehidupan yang penuh bayang-bayang hitam dan pergulatan seru (penuh intrinsik, kekejaman, kekerasan, nafsu kekuasaan, kemunafikan, kepalsuan, dan lain-lain) yang terselubung rapi dengan gaya yang elegan dan keapikan.

D. Instrumen-Instrumen Hukum untuk Melindungi Anak

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) th 1989, yang telah diratifikasi oleh lebih 191 negara. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Kepres Nomor 36 th 1990. Dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Konvensi Hak-Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak

asasi manusia yang memasukan masing-masing hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut, pertama penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh negara, ketiga peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.

Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 40 Konvensi Hak Anak yang berbunyi “Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak azazi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali/reintegrasi anak dan peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat”.

Selain itu Konvensi Hak Anak juga menetapkan bahwa adalah kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan secara khusus (*special protection measures*) kepada setiap anak yang dirampas kebebasannya (*children deprived of liberty*) karena berkonflik dengan hukum. Kewajiban tersebut nampak pada pasal-pasal berikut :

Pasal 37

Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa :

- (a) Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun;
- (b) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan,

penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat;

- (c) Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat, dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa.
- (d) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu.

Kemudian dalam Pasal 37 ayat c Konvensi hak anak dinyatakan :

“Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusiaanya”.

Pasal 39

Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi kembali sosial seorang anak yang menjadi korban bentuk penelantaran apa pun, eksploitasi atau penyalahgunaan, penganiayaan atau bentuk perlakuan kejam yang lain apa pun, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, atau konflik bersenjata. Penyembuhan dan integrasi kembali tersebut harus berlangsung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, harga diri dan martabat si anak.

Di Indonesia hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur di dalam Undang-undang no. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diantaranya mengatur tentang pemeriksaan terhadap anak harus dalam suasana kekeluargaan, setiap anak berhak didampingi oleh penasehat hukum, tempat

tahanan anak harus terpisah dari tahanan orang dewasa, penahanan dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat, hukuman yang diberikan tidak harus dipenjara /ditahanan melainkan bisa berupa hukuman tindakan dengan mengembalikan anak keorang tua atau walinya serta pasal-pasal lainnya yang cukup memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (HAM) pada Pasal 66 juga mengatur hak anak yang berkonflik dengan hukum. Demikian juga dalam Undang-undang Perlindungan Aanak yang disahkan pada tanggal 23 September 2002 Pasal 64 mengatur :

- (1). Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak.
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. Penjediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan
 - g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;

- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Berdasarkan perundang-undangan yang diuraikan dan situasi kondisi (fakta) yang terjadi selama ini, maka upaya penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversi dan keadilan restorative (*Restorative Justice*) merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Pasal 4 UU Pengadilan Anak Batas umur Anak dapat diajukan ke Sidang Anak : sekurang-kurangnya 8 tahun.

Sementara Pasal 5 menyebutkan bahwa, Anak dibawah umur 8 tahun yang bermasalah dengan hukum dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tersangka dapat disidik.
2. Dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
3. Diserahkan kepada Departemen Sosial atas rekomendasi BAPAS.

E. Perlindungan Terhadap Anak yang Bermasalah dengan Hukum

Sesungguhnya usaha perlindungan anak telah diupayakan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial yang peduli dengan permasalahan anak. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia karena situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah maupun masyarakat sendiri.

Namun demikian keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum terhadap anak diharapkan sebagai bentuk **kontrol** dan **empaty** dalam

arti kepekaan terhadap permasalahan yang dihadapi, terhadap perubahan sosial dan kebutuhan publik serta bentuk tanggungjawab masyarakat secara nyata di bidang hukum. Secara teoritis masyarakat dimaknai sebagai suatu bentuk penataan hidup yang sedikit banyak bersifat mandiri, ia adalah pola hubungan yang tertib antara pribadi-pribadi yang hidup bersama-sama yang mempunyai realitas dan obyektifitas tertentu yang bersifat *manidir vis a vis* anggota-anggota dari kelompok yang bersangkutan.⁹

Di samping itu penanganan masalah sosial oleh masyarakat sendiri dalam banyak hal juga dapat berkedudukan saling mengisi dan dan saling melengkapi tindakan penanganan yang dilakukan oleh institusi pemerintah (negara). Sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan hubungan saling melengkapi tersebut, Glassner dan Freedman mencoba menempatkan usaha pelayanan sosial yang merupakan salah satu implementasi dari kebijakan sosial oleh negara bukan merupakan aktivitas yang berdiri sendiri, akan tetapi berada dalam konteks lingkungan sosial tertentu.¹⁰

Respon masyarakat terhadap masalah sosial pada umumnya merupakan tindakan bersama yang diharapkan berdampak pada kondisi kehidupan yang lebih baik. Secara umum dapat dikatakan, bahwa masyarakat yang dapat mengelola dan mengatasi masalah sosial, memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat lainnya. Sebaliknya ketidak mampuan masyarakat untuk menangani dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi dapat melahirkan kondisi social *illfare* sebagai lawan kata dari *social welfare*.¹¹ Individu bersedia untuk hidup di bawah pola tingkah laku yang normatif itu,

⁹ Theodore M. Steeman, *Religious and National Integration*, Disertation, Harvard University, 1973, page 14.

¹⁰ Barry Glassner, and Jonathan Freedman, 1979, *Clinical Sociology*, Longman, New York, London, page 45.

¹¹ James Midgley, 2005, *Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*, Ditperta, Departemen Agama, Jakarta, hal.21.

sekalipun dengan mengorbankan kebebasannya adalah oleh karena pola itu mereka yakini sebagai benar, baik dan perlu.¹²

Hak anak untuk memperoleh bantuan Hukum

Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum yang berlaku sampai saat ini terutama mengenai perlindungan anak belum cukup ampuh untuk memberikan kondisi yang lebih baik dalam arti menyingkirkan kondisi yang buruk bagi anak. Keterpurukan kondisi anak pada umumnya semakin diperburuk dengan kondisi ekonomi yang semakin berat bagi masyarakat pada umumnya.

Hak-hak anak saat dalam proses di kepolisian, kejaksaan yaitu :

- a. Didampingi orang tua
- b. Didampingi penasehat hukum
- c. Didampingi psikolog
- d. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
- e. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi
- f. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial
- g. Pemberian akses untuk mendapat informasi

Mengenai perkembangan perkara Hak-hak anak anda saat dalam proses di pengadilan, yaitu :

- a. Anak sebagai korban tidak perlu hadir dalam setiap persidangan
- b. Anak baru perlu hadir pada saat diminta keterangan sebagai saksi korban
- c. Saat dimintai keterangan, anak berhak untuk didampingi orangtua, penasehat hukum dan psikolog.

¹² Eka Dharmaputera, Pancasila : Identitas dan Modernitas Tinjauan Etnis dan Budaya, Jakarta : BPK Gunung Mulia, hal. 8.

Hak anak dalam proses hukum

1. Tingkat penyidikan

- a. Pemberitaan harus menggunakan singkatan baik nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuh.
- b. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
- c. Proses penyidikan wajib dirahasiakan.
- d. Sejak ditangkap/ditahan berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat.
- e. Pemeriksaan.
- f. Baik tersangka maupun orang tua, wali atau orang tua asuh wajib diberitahu oleh pejabat yang melakukan penangkapan/penahanan, mengenai hak memperoleh bantuan hukum Saat dalam penangkapan/penahanan, berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi **tanpa didengar** oleh pejabat yang berwenang.

2. Tingkat penuntutan

- a. Pemberitaan harus menggunakan singkatan baik nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuh.
- b. Wajib segera diproses bila dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (Penuntut Umum wajib secepatnya membuat surat dakwaan).

3. Tingkat sidang pengadilan

- a. Pemeriksaan di sidang tertutup untuk umum.
- b. Pemberitaan harus menggunakan singkatan baik nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuh.
- c. Terdakwa didampingi orangtua, wali, orangtua asuh, penasihat hukum pembimbing kemasyarakatan termasuk dalam pemeriksaan saksi.
- d. Orangtua, wali atau orangtua asuh wajib hadir dalam sidang.

4. Di Lembaga Pemasyarakatan Anak

- a. Harus terpisah dari orang dewasa.
- b. Dapat ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan pemerintah/swasta, syaratnya : Kepala LP mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman.
- c. anak yang telah berumur 18 tahun harus dipindah ke LP, tapi ditempatkan terpisah dari yang telah berumur 21 tahun atau lebih.

5. Pemeriksaan sidang anak

a. Sebelum sidang dibuka

- 1) Hakim memerintahkan Pembimbing kemasyarakatan (petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan).
- 2) Melaporkan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.

Laporan berisi: (a) Data individu anak , keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak (b) Kesimpulan dan pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.

b. Saat persidangan

- 1) Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasihat hukum serta petugas lain tidak memakai toga atau pakaian dinas.
- 2) Selama persidangan, termasuk pada pemeriksaan saksi, orangtua, wali, orangtua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan hadir dalam sidang.
- 3) Saat pemeriksaan saksi, hakim dapat memerintahkan terdakwa dibawa keluar ruang sidang.

c. Sebelum dan saat putusan akan dibacakan

- 1) Sebelum putusan, hakim memberi kesempatan pada orang tua, wali, orangtua asuh untuk menyampaikan hal-hal yang dapat meringankan anak.

- 2) Putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.
- 3) Putusan wajib dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak

1. Pidana Pokok berupa :

a. Pidana Penjara :

- 1) Paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
- 2) Bila belum berumur 12 tahun, cukup dijatuhkan salah satu tindakan (lihat penjelasan berikutnya).
- 3) Untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati/hukuman seumur hidup, lamanya maksimal 10 tahun.
- 4) Bila belum berumur 12 tahun, cukup diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan , pembinaan dan latihan kerja.

b. Pidana Kurungan : paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa;

c. Pidana Denda

- 1) Paling banyak $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
- 2) Bila tidak mampu membayar, diganti dengan wajib latihan kerja.
- 3) Lama wajib latihan kerja tersebut maksimal 90 hari kerja dan tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

d. Pidana Pengawasan

- 1) Paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun.
- 2) Pengawasan berada di bawah jaksa dan pembimbing kemasyarakatan.

2. Pidana tambahan, bisa berupa :

a. Perampasan barang-barang tertentu, atau

- b. Pembayaran ganti rugi.
- c. Pembayaran ganti rugi menjadi tanggung jawab orangtua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.

3. Tindakan, bisa berupa :

- a. Mengembalikan kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- d. Selain bentuk hukuman di atas, hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat.

Upaya Hukum

Setelah ada putusan dan anda tidak puas dengan hasilnya maka dapat mengajukan :

1. Banding

- a. Upaya hukum untuk putusan pengadilan anak tingkat pertama.
- b. Hakim yang memeriksa hanya 1, kecuali bila ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi harus hakim majelis (lebih dari satu).

2. Kasasi

- a. Upaya hukum untuk putusan pengadilan anak tingkat banding
- b. Hakim yang memeriksa hanya 1, kecuali bila ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi
- c. harus hakim majelis (lebih dari satu)
- d. Hakim ditetapkan oleh SK Ketua MA

3. Peninjauan Kembali

Upaya hukum untuk putusan pengadilan anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

G. Kesimpulan

Seorang remaja yang melakukan tindakan-tindakan yang dipandang kriminal oleh masyarakat umum, harus berhadapan dengan pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum positif. Apabila seorang hakim memandang bahwa seorang anak telah mampu membedakan secara hukum, maka hakim memutuskan hukum pidana kepadanya dengan pengurangan 1/3 hukuman pidana biasa atau alternatif lain anak tersebut diserahkan kepada negara untuk di didik tanpa hukuman pidana apapun, tetapi apabila anak tersebut dipandang oleh hakim belum mampu membedakan perbuatannya secara hukum maka anak tersebut dikembalikan kepada orang tua atau wali untuk diasuh tanpa hukuman pidana apapun

Hukuman yang diberikan pada remaja ini dimaknai sesuai dengan tujuan hukuman yaitu melindungi ketertiban umum sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Anak pelaku kejahatan dapat saja tidak dijatuhi pidana, yaitu dikenai tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 22 dan 24 UU 3 Tahun 1997. Penjatuan pidana perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak pelaku kejahatan harus dilakukan oleh hakim sebagai hal ultimum remedium, pilihan terakhir, dan hanya untuk kepentingan anak. Bagaimanapun penjara bukan tempat yang baik bagi anak. Di sisi lain hakim harus memerhatikan keseimbangan dan tuntutan keadilan dari masyarakat yang terkena dampak kejahatan. Oleh karena itu hukum yang dikenakan bukanlah satu pembalasan dendam, para perilaku delikuen tetaplah manusia, yang satu atau lain hal menyebabkannya terperosok pada lembah perilaku yang salah. Harapan dari hal ini lebih jauh akan menimbulkan kontramotif yang merupakan satu tekanan kepada jiwa.

****-====****

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung, 2007.
- Hadisuprpto, Paulus *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penggulungannya)*. Penerbit PT Citra Aditya Bhakti.
- Irwanto, *Anak yang berkonflik, Penyebab dan Penanggulangannya*, Jakarta, Jurnal PKM Unika Atmajaya, 1998.
- Mangunsong, Purniati, Masalah Perlindungan Anak yang berkonflik dengan Hukum, Jakarta, Jurnal PKM Unika Atmajaya, 1998.
- Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja (Pedoman Riyadh) disahkan melalui Resolusi Maelis PBB No.45, 14 Desember 1990. Unicef.
- Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Remaja (Beijing Rules) disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No.40/33, tanggal 29 November 1985 , Unicef.
- Peraturan-Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perlindungan Remaja yang kehilangan Kebebasannya. Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No.45/133 tanggal 14 November 1990, Unicef.
- Prajasa, Heru, *Gambaran Anak yang berkonflik dengan Hukum*, Jakarta, Jurnal PKM Unika Atmajaya, 1998.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.3/1977 tentang *Pengadilan Anak*, Biro Hukum Departemen Sosial Republik Indonesia tahun 1977.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.